

**STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN ANAK TERLANTAR**

SKRIPSI

Diajukan oleh:

NURUL RAHMATI

NIM. 220802066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2026**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Rahmati

NIM : 220802066

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Tempat/Tanggal Lahir : Lambaet, 29 Febuari 2004

Alamat : Lambaet, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap makalah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 02 Mei 2026

Yang menyatakan




Nurul Rahmati

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING
STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM
PENANGANAN ANAK TERLANTAR
ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S-I) Dalam Program Studi Ilmu Administrasi

Oleh:

NURUL RAHMATI

NIM. 220802066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara

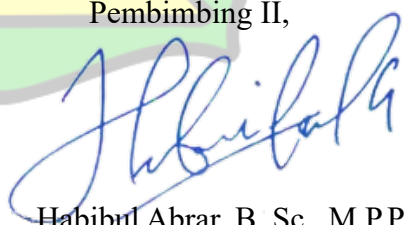
Disetujui untuk di munaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si

NIP. 197810162008011011


Habibul Abrar, B. Sc., M.P.P.

NIP. 199407072025051005

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN
ANAK TERLANTAR

NURUL RAHMATI

NIM. 220802066

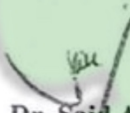
Telah di Uji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: 21 Agustus 2026

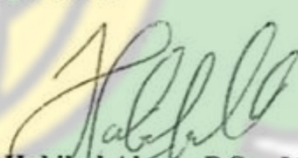
Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Sekretaris


Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P.
NIP. 199407072025051005

Penguji I


Zakki Fuad Khalil, S.IP., Msi
NIP. 199011192022031001

Penguji II


Putri Marzaniar, MPA
NIP. 1998110220240320001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Muli Mulia, M. Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Penanganan anak terlantar merupakan bagian dari kewajiban pemerintah daerah menjamin hak hak anak dan mewujudkan kesejahteraan sosial. Di Kota Banda Aceh pelaksanaan fungsi tersebut oleh Dinas Sosial melalui bermacam macam program strategis, seperti rehabilitasi sosial, pendampingan, serta pembinaan. Selain itu, optimalisasi penanganan juga dilakukan dengan membangun koordinasi dan sinergi bersama berbagai lembaga terkait. Fokus utama dari kajian ini untuk menganalisis strategi yang diimplementasikan oleh Dinas sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar sekaligus memetakan berbagai faktor pendorong maupun penghambat dalam melaksanakan langkah tersebut. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif berbasis metode deksriptif guna untuk menjelaskan sebuah fenomena secara rinci tentang strategi penanganan anak terlantar yang dilaksanakan dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Data memperoleh secara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada informan itu sendiri yang terdiri atas kepala bidang rehabilitasi sosial, penyuluh sosial ahli muda, petugas rumah singgah, dan anak yang pernah memperoleh layanan dari Dinas Sosial. Analisis dilakukan menggunakan teori strategi Geoff Mulgan yang meliputi tujuan (golas), lingkungan (environment), pengarahan (direction), tindakan (action) dan pembelajaran (learning). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa langkah strategis yang dijalankan telah mengarah pada pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan anak melalui kegiatan pendekatan, asasmen, rehabilitasi sosial, pendampingan, serta kerja sama lintas sektor. Pelaksanaan strategi didukung oleh koordinasi antar lembaga, komitmen oparatur, dan partisipasi beberapa lembaga sosial. Dengan demikian, prosesnya masih ditemui sejumlah hambatan, salah satunya berkaitan dengan keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, anggaran, sarana pendukung, serta masih rendahnya kepedulian Sebagian keluarga dalam memberikan pengasuhan kepada anakkeadaan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan dalam menangani anak terelantar juga di pengaruhi oleh pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, keluarga, serta masyarakat. Kerja sama tersebut perlu dilakukan agar pelayanan dan penanganan yang diberikan dapat berjalan secara optimal serta mampu meningkatkan kesejahteraan anak.

Kata Kunci: Strategi, Dinas Sosial, Anak Terlantar, Geoff Mulgan, Kota Banda Aceh

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Terlantar”**.

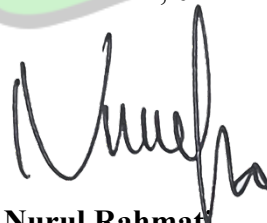
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Aceh. Dalam penyusunan tugas akhir ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam hal materi maupun teknik penyusunan. Namun berkat bantuan dan support dari berbagai pihak, Alhamdulillah peneliti mampu menyelesaikan tugas akhir ini. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B. Sc., M.P.A., selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. Dr. Said Amirulkamar, M.M., M. Si. selaku dosen pembimbing I yang

telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

5. Habibul Abrar, B.Sc., M.P.P. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Ranry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
7. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dan seluruh pihak yang telah bersedia menjadi informan serta memberikan data, informasi, dan bantuan kepada penulis selama proses penelitian berlangsung.
8. Penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada pihak petugas Rumah Singgah, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi serta membantu penulis data memperoleh data yang diperlukan selama penelitian.
9. Kedua orang tua, adik, keluarga, dan sahabat tersayang terima kasih atas doa, nasehat dan bimbingannya, serta kasih sayang yang selalu diberikan.

Banda Aceh, 01 Juli 2026



Nurul Rahmat
NIM. 220802066

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah.....	10
1.4 Tujuan Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian.....	11
BABII TINJUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu	12
2.2 Landasan Teori	16
2.2.1 Teori Strategi	17
2.3 Indikator strategi.....	21
2.4 Anak terlantar	26
2.4.1 Pengertian anak terlantar	26
2.4.2 Ciri ciri anak terlantar	27
2.4.3 Faktor faktor penyebab anak terlantar.....	28
2.3. Kerangka Berpikir	30
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1. Lokasi Penelitian.....	30
3.2. Fokus Penelitian.....	30
3.3. Jenis Penelitian.....	31
3.4. Metode Pengumpulan Data	31
3.5 Informan Penelitian	33
3.6 Sumber Data	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
4.1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	37

4.1.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	40
4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	42
4.1.5. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	44
4.1.6. Data Anak Terlantar yang Ditangani Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024.....	45
4.3. Hasil Penelitian	48
4.4.2. Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Terlantar	50
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	67
DAFTAR LAMPIRAN	70



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Anak Terlantar yang Ditangani Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024	
Tabel 2 Fokus Penelitian	30
Tabel 3 Informan Penelitian	33
Tabel 4 Jadwal Penelitian.....	36
Tabel 5 Data Anak Terlantar yang Ditangani Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh	42
Gambar 2 Dinas Sosial Kota Banda Aceh.....	73
Gambar 3 Petugas Rumah Singgah.....	73
Gambar 4 Anak Terlantar	73



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keputusan pembimbing.....	70
Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian.....	71
Lampiran 3 Surat Pemohonan Penelitian.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak merupakan amanah serta anugerah dari Tuhan yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia. Dengan demikian, keberadaan anak harus dihormati, dilindungi, serta dipenuhi hak-haknya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki kedudukan dan peran yang penting bagi keberlanjutan keberlanjutan bangsa di masa mendatang, anak memiliki peranan yang sangat dalam keberlangsungan pembangunan nasional pada masa mendatang.¹ Atas dasar tersebut, pemenuhan hak anak perlu diwujudkan melalui pemberian perlindungan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan diri secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki. Pemenuhan hak merupakan tanggung jawab yang melibatkan keluarga, masyarakat, serta pemerintah guna menjamin terwujudnya kesejahteraan anak secara menyeluruh. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh pemenuhan hak secara optimal karena adanya berbagai permasalahan sosial, salah satunya adalah kondisi keterlantaran.

Perlindungan anak di wilayah Indonesia sudah diatur dan dijamin melalui sejumlah ketentuan dalam ketentuan penundang-undangan yang berlaku. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat (2) menyatakan

¹ Irwan Sandi, 'implementasi kebijakan perlindungan anak terlantar pada dinas sosial provinsi sulawesi tengah irwan', *E Jurnal Katalogis*, 4 (2019), 150–60.

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pasal 34 ayat (1) UUD 1945 Ketentuan tersebut mengatur bahwa fakir miskin dan anak terlantar termasuk dalam kelompok yang menjadi kewajiban negara untuk dipelihara. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan serta penyelenggaraan layanan sosial kepada anak yang berada dalam kondisi terlantar, sehingga hak hak dasar mereka tetap dapat terpenuhi. Dasar hukum perlindungan anak juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai kewajiban pemerintah untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan anak.² Dengan demikian, tanggung jawab dalam melindungi anak terlantar tidak hanya berada pada keluarga, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah melalui penyediaan pelayanan kesejahteraan pemenuhan kebutuhan sosial sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak.

Anak dapat dikategorikan sebagai terlantar apabila mengalami kondisi di mana kebutuhan dasarnya belum terwujud secara optimal, mencakup aspek fisik, psikologis, spiritual, maupun sosial. Kondisi keterlantaran ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi kehidupan dan pengasuhan anak, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat Pendidikan orang tua, konflik keluarga, perceraian, kehilangan orang tua, hingga ketidak mampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pengasuhan. Selain itu, lemahnya pengawasan orang tua, penyalahgunaan narkoba, serta rendahnya kepedulian lingkungan juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seorang anak berada dalam

² Tentang Perlindungan Anak and others, 'undang-undang republik indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan', 2014.

kondisi terlantar.³ Kondisi tersebut mengakibatkan anak kehilangan akses terhadap pendidikan, Kesehatan, perlindungan, serta lingkungan yang mendukung proses tumbuh kembangnya. Apabila tidak ditangani secara tepat, keterlantaran anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang lebih kompleks, seperti eksploitasi anak, pekerja anak, anak jalanan, penyalahgunaan narkoba, hingga meningkatnya resiko perilaku menyimpang.

Dalam perspektif perlindungan anak, Arif Gosita (2004) menyatakan bahwa perlindungan terhadap anak mencakup berbagai langkah yang ditempuh untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan anak, sehingga anak memperoleh kesempatan untuk menjalin kehidupan, mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan, serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai martabat kemanusiaannya. Sementara itu, Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas (1999) menekankan bahwa perlindungan terhadap anak bertujuan untuk memberikan rasa aman serta memastikan pemenuhan hak-hak anak sehingga anak memperoleh kesempatan untuk berkembang secara maksimal tanpa mengalami diskriminasi maupun perlakuan yang merugikan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak terlantar berperan penting dalam upaya mewujudkan kesejahteraan sosial di Indonesia.⁴ Berdasarkan pandangan tersebut, perlindungan anak terlantar menjadi bagian penting dalam mendukung tercapainya kesejahteraan sosial, dan anak merupakan termasuk

³ 'Lhery Swara Oktaf Adhania, "Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang", Vol.3 No. 2 (2019), Hlm. 29-30.'

⁴ Sandi.

kelompok yang memiliki tingkat kerentanan tinggi dan membutuhkan perhatian serta perlindungan dari berbagai pihak.

Permasalahan anak terlantar masih menjadi salah satu persoalan upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Berdasarkan jumlah Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, angka anak terlantar pada tahun 2024 sebanyak 9 anak, kemudian menurun menjadi 4 anak pada tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih terus terjadi dan memerlukan penanganan dan perhatian terhadap penanganan yang lebih optimal oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Tabel 1 Data Anak Terlantar yang Ditangani Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2023-2025

Data Tahun 2024

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1.	SA	Banda Aceh, 26-22-2015	Peuniti Banda Aceh
2.	KO	Banda Aceh, 10-10-2020	Peuniti Banda Aceh
3.	KH	Banda Aceh, 02-06-2022	Peuniti Banda Aceh
4.	MH	Geuceu, 02-04-2007	Lubok Lambaro Aceh
5.	AL	Bireun 2008	Peuniti Banda Aceh
6.	MF	Pulo Aceh, 16-09-2007	Ulee lee Banda Aceh
7.	MA	Aceh Timur, 07-06-2008	Emperom BandaAceh
8.	AB	Kp. Neuheun, 2018	Neuheun kp Pie
9.	SL	Medan, 2010	Medan

Data Tahun 2025

NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1.	AM	Aceh Tamiang, 04-08-2022	Ujong Batee
2.	AF	Aceh Tamiang, 14-06-2024	Ujong Batee

3.	MR	Aceh Tenggara, 2013	Aceh Tenggara
4.	CAY	Aceh Tenggara, 2019	Aceh Tenggara

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Pada Tabel 1.1, tercatat jumlah anak terlantar yang di tangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengalami penurunan selama periode 2024-2025. Pada Tahun 2024 terdapat 9 anak terlantar yang ditangani, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut menurun menjadi 4 anak. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perubahan jumlah kasus anak terlantar yang di tangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam kurun waktu tersebut. Meskipun mengalami penurunan, permasalahan anak terlantar masih menjadi salah satu tantangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kota Banda Aceh. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang efektif, terarah, dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan serta memberikan perlindungan kepada anak terlantar.

Tabel 2. Faktor Penyebab Anak Terlantar Berdasarkan Hasil Asasmen Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

No	Faktor penyebab	Keterangan
1.	Kemiskinan	Keterbatasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak seperti pendidikan
2.	Penceraian	Anak tidak memperoleh pengasuhan yang memadai
3.	Orang tua meninggal dunia	Anak kehilangan pengasuhan utama
4.	Penyalahgunaan narkoba	Orang tua menelantarkan anak

5.	Anak jalanan	Tidak memperoleh perlindungan keluarga
----	--------------	--

Sumber: Berdasarkan Hasil Asasmen Dinas Sosial

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa anak terlantar di Kota Banda Aceh disebabkan oleh berbagai kondisi yang berkaitan dengan keadaan ekonomi, keluarga, pengasuhan, dan lingkungan sosial. Faktor kemiskinan menjadi salah satu penyebab yang sering ditemukan karena keterbatasan ekonomi dapat menyebabkan orang tua mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Selain itu, perceraian dan meninggalnya orang tua dapat menyebabkan anak kehilangan pengasuhan yang memadai. Penyalahgunaan narkoba dalam keluarga juga dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menjalankan fungsi pengasuhan dengan baik, sedangkan kondisi anak yang hidup di jalanan menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan dan pengawasan orang tua.

faktor tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar tidak hanya disebabkan oleh satu kondisi, tetapi juga berkaitan dengan berbagai permasalahan keluarga sosial. Oleh karena itu, penanganan anak terlantar membutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada anak, tetapi juga mempertimbangkan kondisi keluarga dan lingkungan yang menjadi faktor penyebab keterlantaran.⁵

Sebagai perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial memiliki berperan strategis dalam menangani

⁵ Kimiko Miyeki and Stisip Imam Bonjol, 'Implementasi Penanganan Antar (Anak Terlantar) Di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Pusat Pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh Memiliki Sosial Yang Cukup Tinggi Sehingga Berbagai Persoalan Kesejahteraan Sosial Masih Dapat Ditemukan, Ter', 1.2 (2023), 137–42.

berbagai permasalahan anak terlantar. Berdasarkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, penanganan yang dilakukan tidak hanya berupa pemberian bantuan, tetapi juga melalui berbagai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan anak. Berdasarkan hasil penelitian, penanganan anak terlantar dilakukan melalui penjangkuan, registrasi dan asasmen, pembinaan di Rumah Singgah, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal sementara, pendampingan, pembinaan terhadap keluarga, serta penempatan anak ke Panti Sosial Aneuk Nanggroe apabila diperlukan. Selain itu, Dinas Sosial juga melakukan pemulangan atau penyatuan Kembali terhadap keluarga apabila keluarga dinilai masih mampu memberikan pengasuhan yang layak.⁶

Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melakukan upaya penanganan secara terhadap sesuai dengan kondisi anak. Penanganan tidak hanya diarahkan untuk mengatasi kondisi anak Ketika ditemukan terlantar, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan, pendidikan, pengasuhan, serta upaya mengembalikan anak kepada lingkungan keluarga apabila memungkinkan. Namun, meskipun berbagai program telah dilaksanakan, jumlah anak terlantar yang di tangani masih mengalami peningkatan pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih membutuhkan strategi penanganan yang efektif, terarah, dan keberlanjutan.

Sebagai pusat pemerintah Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh memiliki sosial yang cukup tinggi sehingga berbagai persoalan kesejahteraan sosial masih dapat ditemukan,

⁶ Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dengan', 2009.

termasuk anak terlantar. Kondisi sosial ekonomi masyarakat, meningkatnya urbanisasi, kemiskinan, perceraian, lemahnya fungsi pengasuhan keluarga, serta rendahnya kepedulian lingkungan menjadi beberapa faktor yang berpotensi menyebabkan anak berada dalam kondisi terlantar.⁷ Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Banda Aceh dituntut untuk mampu merumuskan dan melaksanakan strategi penanganan yang efektif agar hak hak anak tetap terpenuhi serta mampu mencegah munculnya kasus kasus keterlantaran anak di masa mendatang.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh menerapkan berbagai strategi dalam menangani anak terlantar. Strategi tersebut dapat berupa pendataan dan identifikasi anak terlantar, pengjangkuan lapangan, asesmen kebutuhan anak, pemberian layanan rehabilitasi sosial, penempatan pada lembaga kesejahteraan sosial anak, serta menjalin koordinasi dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat yang berperan dalam bidang perlindungan anak. Keberhasilan strategi tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan perlindungan terhadap anak.

Meskipun Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai program dan upaya penanganan terhadap anak terlantar, keberadaan anak terlantar masih dapat ditemukan di beberapa wilayah Kota Banda Aceh. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Keberadaan anak terlantar tersebut menimbulkan pertanyaan

⁷ Universitas Ubudiyah Indonesia, Murnia Suri, and Dinas Sosial, 'Perlindungan Kesejahteraan Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak) Protection of Child Welfare in Banda Aceh City (Study On The Implementation of Qanun No . 11 of 2008 Concerning Protection of Children)', 8.2 (2022), 1–8.

mengenai bagaimana strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar, serta sejauh mana strategi tersebut mampu mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu masih ditemukan anak terlantar menunjukkan adanya factor-factor tertentu yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi penanganan, baik yang berasal dari internal Dinas Sosial maupun dari lingkungan keluarga dan masyarakat.⁸

Beberapa penelitian terdahulu lebih banyak membahas mengenai perlindungan anak, rehabilitasi sosial, maupun pelayanan kesejahteraan sosial terhadap anak terlantara. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar. Atas dasar terkait permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai anak terlantar sekaligus mengisi kekosongan kajian pada penelitian penelitian sebelumnya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan anak terlantar menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serta penanganan secara berkelanjutan. Meskipun Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melaksanakan berbagai cara dalam menghadapi anak terlantar, peningkatan jumlah kasus pada beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa efektivitas strategi yang diterapkan masih perlu di pelajari lebih mendalam. Oleh sebab itu, penelitian yang membahas strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar penting dilakukan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh

⁸ Darussalam-banda Aceh, 'Upaya Pencegahan Dan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dilakukan Oleh Dinas Sosial Yang Berkoordinasi Dengan Instansi Terkait, Aparat Kecamatan Dan Gampong Atau Nama Lain, Tokoh Masyarakat, Ulama, Dan Tokoh Agama Lainnya.', 2020.

berdasarkan indikator strategi Geoff Mulgan, serta mengetahui berbagai faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan strategi tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung pengembangan Ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam kajian kebijakan dan pelayanan kesejahteraan sosial, serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam meningkatkan efektivitas penanganan anak terlantar.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih ditemukan anak terlantar di beberapa wilayah Kota Banda Aceh meskipun Dinas Sosial telah melaksanakan berbagai program penanganan anak terlantar.
2. Terdapat berbagai faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi penanganan anak terlantar.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar?
2. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melaksanakan strategi penanganan anak terlantar?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian sebagai ranvang bangun dari tinjuan secara teoritis dan tinjuan yang dilakukan secara praktis

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik, terutama yang berkaitan dengan strategi organisasi public dalam penyelenggraan pelayanan sosial dan penanganan anak terlantar.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sebagai bahan masukan, evaluasi, dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas strategi penanganan anak terlantar.



BAB II TINJUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penulis	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Teori/kerangka konseptual	Metode Penelitian	Hasil Peneli
1.	Nur Hayati (2024) ⁹	Peran dinas sosial dalam menanggapi anak terlantar berdasarkan peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak di Kota Pekanbaru	Bertujuan untuk memahami bagaimana paran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam upayam menangani anak terlantar dengan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3	Penelitian menggunakan teori Peran yang menjelaskan fungsi dan tanggung jawab Dinas Sosial dalam melindungi anak terlantar. Fokus penelitian diarahkan pada pelaksanaan peran Dinas Sosial sesuai	Metode penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data siperoleh melalui wawancara, observasi, dan dekumentasi. Informan penelitian meliputi atas Kepala Seksi rehabilitasi dan Perlindungan	Hasil peneli menunjukkan bahwa Dinas Kota Pekanbaru telah menjal perannya da menangan a terlantar me pelayanan rehabilitasi s perlindungan pendamping pemenuhan hak yang dir anak terlanta Akan tetapi, menemukan beberapa ke

⁹ 'Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru', 2024.

			Tahun 2013 tentang perlindungan hak dasar anak serta mengetahui berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan upaya menangani anak terlantar.	ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013.	Anak, staf Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Anak, serta anak terlantar.	seperti sulit memperoleh informasi dari keluarga anak untuk proses asesmen serta terbatasnya penerimaan anak terlantar di panti sosial.
2.	Sulaiman Tamba (2019) ¹⁰	Perlindungan anak terlantar menurut hukum Islam.	bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak terlantar berdasarkan ketentuan hukum Islam serta menjelaskan kewajiban	Menggunakan ide dasar perlindungan anak berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, Konvensi Hak Anak, peraturan tentang perlindungan	Dalam penelitian ini berfokus pada kajian normative mengenai perlindungan anak terlantar berdasarkan hukum Islam dan peraturan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak terlantar merupakan anak yang kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, baik jasmani, rohani maupun sosial. Penyebab utama keterlantarannya

¹⁰ 'Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam', 18.

			kepada orang tua, masyarakat, dan negara dalam pemenuhan hak hak anak terlantar.	Anak, serta teori perlindungan anak dari Arif Gosita.	perundang undangan.	lain kurangnya orang tua, ke ekonomi, perubahan s serta lemah dukungan pemerintah. perspektif Is anak wajib memperoleh perlindungan pengasuhan, Pendidikan, pemenuhan haknya seba kewajiban o tua, masyara dan negara.
3.	Imam Sukadi, Gatot Sapto Heriyawanto, dan Mila Rahayu Ningsih (2020) ¹¹	Perlindungan hukum terhadap anak terlantar dalam perspektif negara kesejahteraan.	Dalam kajian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana bentuk perlindungan hukum	Penelitian ini menggunakan konsep Negara Kesejahteraan (welfare state) sebagai landasan utama. Selain	Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan	Hasil peneli menunjukkan bahwasanya mempunyai kewajiban konstitusional dalam upaya melindungi

¹¹ Imam Sukadi and others, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan', 14.2 (2020) <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>>.

			terhadap anak terlantar berdasarkan konsep negara kesejahteraan (welfare state) serta menjelaskan tanggung jawab negara dalam memenuhi kewajiban dasar anak terlantar sesuai amanat UUD 1945 dan peraturan perundang undangan yang berlaku.	itu penelitian juga menggunakan konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon serta konsep perlindungan anak berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.	konseptual (conceptual approach). Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, sedangkan teknis analisis menggunakan content analysis.	memenuhi kebutuhan anak terlantar sebagai bagian dari pelaksanaan konsep negara kesejahteraan Perlindungan tersebut melingkupi hak atas pendidikan, Kesehatan, kesejahteraan, pengasuhan, perlindungan hukum. Peneliti juga menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap anak terlantar hanya berada di tangan pemerintah, juga melibatkan keluarga dan masyarakat.
--	--	--	--	---	--	---

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar, seperti penjangkuan, pendataan dan asasmen, pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, pembinaan keluarga, serta penempatan anak di panti sosial, keberadaan anak terlantar masih menjadi permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang telah dilakukan masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan tersebut secara menyeluruh.

Penelitian terdahulu pada umumnya lebih banyak membahas mengenai perlindungan anak, rehabilitasi sosial, pemenuhan hak anak, serta peran pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan anak terlantar. Namun, penelitian yang secara khusus mengkaji strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar, mulai dari proses penjangkuan hingga pemulangan atau penempatan anak, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan strategi tersebut masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengkaji secara lebih khusus strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar beserta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Strategi

Strategi berasal dari Bahasa Yunani kuno, yaitu *strategos*, yang berarti “Pemimpin pasukan” atau “jenderal perang”. Pada awalnya, konsep strategi digunakan dalam dunia militer untuk menggambarkan kemampuan seorang pemimpin dalam mengatur dan mengarahkan pasukan guna mencapai kemenangan dalam pertempuran. Seiring perkembangan zaman, konsep strategi tidak hanya digunakan dalam militer, tetapi juga diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk organisasi, pemerintahan, dan bisnis. Pada dasarnya, strategi merupakan rencana yang disusun secara terstruktur guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Pada ilmu manajemen, strategi dipandang sebagai satu konsep yang memiliki cakupan luas karena berkaitan dengan proses perencanaan, pengambilan keputusan, serta pencapaian tujuan Organisasi dalam jangka Panjang. Pada dasarnya, strategi merupakan rangkaian rencana serta langkah langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Selain itu, strategi juga berperan penting dalam membantu organisasi menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di dalam maupun diluar organisasi.

Menurut Alfred D. Chandler, strategi merupakan penentuan tujuan sasaran dalam jangka Panjang organisasi yang disertai dengan penetapan langkah-langkah serta pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut.¹² Definisi ini menunjukkan bahwa strategi tidak hanya mencakup dengan penetapan tujuan

¹² ‘Jr. Alfred D. Chandler, *Strategy And Structure: Chapters In The History Of The Industrial Empire* (Cambridge: Mit Press).’, 2026.

organisasi, tetapi juga mencakup upaya dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara tepat sehingga tujuan jangka Panjang yang telah ditentukan dapat tercapai dengan optimal. Pandangan Chandler menjadi salah satu dasar penting dalam kajian strategi dan manajemen karena menempatkan startegi sebagai penghubung antara tujuan organisasi dengan pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan adanya strategi yang jelas, maka organisai dapat menetapkan langkah-langkah yang sesuai untuk mencapai tujuan jangka Panjang seperti yang telah direncanakan. Pandangan Chandler banyak dijadikan panduan dalam studi startegi dan manajemen karena menegaskan bahwa strategi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan tujuan organisasi dengan Tindakan operasional yang dilaksanakan guna mencapai tujuan tersebut.

Menurut Sheth, strategi adalah suatu kegiatan yang mencakup penyusunan dan pelaksanaan rencana untuk mengalokasikan sumber daya secara tepat serta memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia.¹³ Pandangan ini menunjukkan bahwa strategi bukan hanya sebatas perencanaan, tetapi juga melibatkan implementasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Oleh karena itu, organisasi dituntut tantangan yang muncul dari lingkungan, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan strategi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Sementara itu, kawatir mendefinisikan strategi sebagai rangkaian rencana dan Tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan organisasi dengan tetap mampu beradaptasi terhadap perubahan

¹³ Ananya Sheth and Joseph V Sinfield, 'An Analytical Framework to Compare Innovation Strategies and Identify Simple Rules', *Technovation*, 115.November 2021 (2022), 102534 <<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102534>>.

lingkungan yang kompetitif.¹⁴ Menurut pandangan ini, strategi harus bersifat fleksibel dan responsive agar organisasi dapat menghadapi berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal.

Sementara itu, dalam teori evolusi dikenal konsep Ecalutionarily dan stable strategy (strategi stabil secara evolusioner), yaitu suatu strategi yang mampu bertahan dalam jangka Panjang dan tidak mudah terganti oleh strategi lain Ketika digunakan oleh sebagian dasar anggota dalam suatu populasi. Konsep ini menunjukkan bahwa tercapainya keberhasilan suatu strategi juga bergantung pada hasil yang dicapai dalam jangka pendek, tetapi juga oleh kemampuannya untuk bertahan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi. Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, teori strategi dapat dipahami sebagai konsep yang menjelaskan bagaimana individu maupun organisasi merencanakan, memilih, dan melaksanakan berbagai tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Dalam penerapannya strategi bukan sekedar berkaitan dengan perencanaan, melainkan juga meliputi proses pengambilan keputusan, koordinasi Tindakan, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta upaya menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Berdasarkan hal tersebut, strategi dapat di artikan sebagai proses yang berlangsung secara berkelanjutan secara menjadi pedoman dalam upaya mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien.

¹⁴ Kavar Mohammed Mousa, Khairi Ali Auso Ali, and Sabahat Gurler, 'Strategic Planning and Organizational Performance: An Empirical Study on the Manufacturing Sector', *Sustainability* (Switzerland), 16.15 (2024), 1–17 <<https://doi.org/10.3390/su16156690>>.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, mampu dipahami bahwa strategi merupakan proses yang dilakukan secara sistematis dalam menyusun perencanaan, menetapkan, serta melaksanakan berbagai Tindakan guna mewujudkan tujuan organisasi. Strategi bukan sekedar mencakup perencanaan, melainkan juga melibatkan proses pengambilan keputusan, koordinasi pelaksanaan, pengelolaan sumber daya, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan strategi. Dengan demikian, strategi merupakan pedoman yang berperan penting bagi organisasi dalam mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Geoff Mulgan merupakan seorang akademis dan pakar kebijakan public yang banyak mengembangkan pemikiran mengenai strategi organisasi, inovasi, sosial, dan tata Kelola sektor public. Menurut Geoff Mulgan, strategi tidak hanya dipahami sebagai suatu rencana untuk mencapai tujuan organisasi, tetapi juga sebagai suatu proses yang dinamis yang melibatkan penepatan tujuan, pemahaman terhadap kondisi lingkungan, pemberian arah dalam pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan Tindakan yang terencana, serta pembelajaran melalui proses evaluasi secara berkelanjutan. Berdasarkan pemikiran tersebut, teori Geoff Mulgan dipilih sebagai landasan analisis dalam penelitian ini karena mampu memberikan kerangka yang sistematis untuk mengkaji strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.

Selanjutnya, berlandaskan berbagai pendapat tersebut, penelitian ini menggunakan teori strategi menurut Geoff Mulgan sebagai landasan analisis. Pemilihan teori Geoff Mulgan didasarkan pada pertimbangan bahwa teori ini memiliki indikator yang komprehensif, yaitu tujuan (purpose), lingkungan (environment), pengarahan (direction), Tindakan (action), dan pembelajaran (learning). Kelima indikator tersebut

dinilai mampu secara menggambarkan proses penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi secara menyeluruh sehingga relevan digunakan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.

2.3 Indikator strategi

Setelah memahami pengertian dan konsep strategi dari berbagai pandangan para ahli, Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi indikator indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis suatu strategi. Indikator strategi berfungsi sebagai alat untuk menilai bagaimana suatu strategi dirumuskan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam suatu organisasi. Keberadaan indikator ini sangat penting karena strategi bukan sekedar dikaji sebagai rencana yang tertulis, melainkan juga sebagai suatu proses yang mencakup penentuan arah, pelaksanaan Tindakan, dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Geoff Mulgan mengemukakan bahwa strategi dapat dianalisis lima indikator utama, yaitu tujuan (purpose), lingkungan (environment), pengarahan (direction), Tindakan (action), dan pembelajaran (learning).¹⁵ Kelima indikator tersebut saling berhubungan dan membentuk suatu proses strategi yang utuh. Tujuan menjadi dasar dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Lingkungan berkaitan dengan kondisi internal maupun eksternal yang dapat memengaruhi penyusunan serta pelaksanaan strategi. Pengarahan berfungsi sebagai pedoman dalam mengoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki organisasi supaya dapat berjalan lebih baik untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, Tindakan merupakan bentuk

¹⁵ Martin; Geoff Mulgan Kronberger, 'Mulgan.', *Public Administration Review*, 88.2 (2010), 592–95.

pelaksanaan nyata dari strategi yang telah dirumuskan sebelumnya. Melalui Tindakan, organisasi dapat mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan. Sementara itu, pembelajaran berperan sebagai sarana evaluasi untuk menilai keberhasilan strategi yang telah dijalankan sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan penyesuaian pada masa yang akan datang.

Berdasarkan indikator indikator tersebut, strategi dapat dipahami sebagai suatu proses yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan yang dihadapi organisasi. Oleh karena itu, indikator strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan dapat digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas pelaksanaan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam penelitian ini, indikator tersebut digunakan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.

1. Tujuan (Goals)

Tujuan merupakan salah satu indikator penting dalam strategi karena menjadi landasan dalam menentukan arah dan fokus pelaksanaan suatu program atau kegiatan. Menurut Geoff Mulgan, strategi yang baik harus memiliki tujuan yang jelas, karena tujuan menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi. Kejelasan tujuan yang mendukung organisasi dalam menemukan langkah yang lebih baik untuk mencapai hasil yang seperti diharapkan. Sebaliknya, strategi yang tidak memiliki tujuan yang jelas berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya dan sulit mewujudkan tujuan yang telah tentukan.¹⁶

¹⁶ 'Mulgan.', 2026.

Dalam konteks penelitian ini, tujuan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkaitan dengan upaya penanganan anak terlantar melalui berbagai program dan layanan sosial yang dilakukan guna memenuhi hak-hak anak, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta mencegah terjadinya keterlantaran secara berkelanjutan. Oleh karena itu, tujuan yang jelas menjadi pedoman bagi Dinas Sosial dalam merancang dan melaksanakan berbagai strategi penanganan anak terlantar agar dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Lingkungan (Environment)

Lingkungan merupakan faktor yang mempengaruhi dan pelaksanaan strategi. Geoff Mulgan menjelaskan bahwa strategi yang baik harus didasarkan pada pemahaman terhadap kondisi lingkungan internal maupun eksternal organisasi karena lingkungan dapat menciptakan peluang sekaligus tantangan dalam mencapai tujuan. Strategi lingkungan mencakup berbagai aspek seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, kebijakan pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam lingkungan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan strategi sehingga organisasi perlu dapat beradaptasi dengan berbagai perkembangan yang telah ditetapkan.¹⁷

Pada penelitian ini strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh mencakup kondisi sosial masyarakat, tingkat kesejahteraan keluarga, kebijakan pemerintah mengenai perlindungan anak, serta dukungan berbagai pihak yang terlibat dalam penanganan anak terlantar. Pemahaman terhadap lingkungan tersebut menjadi dasar penting dalam merumuskan strategi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

¹⁷ 'Mulgan.'

3. Pengarahan (Direction)

Pengarahan merupakan proses yang menghubungkan tujuan dengan strategi pelaksanaan. Menurut Geoff Mulgan, strategi harus memberikan arah yang jelas agar seluruh sumber daya dan pihak terlibat dapat bekerja secara terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸

Pengarahan mencakup penentuan prioritas program, pembagian tugas, koordinasi antarbidang, serta penyusunan kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan. Melalui pengarahan yang baik, setiap pihak yang terlibat dapat memahami kesepakatan masing masing sehingga pelaksanaan strategi dapat berjalan lebih efektif.

Dalam penelitian ini, strategi pengarahan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui kebijakan, program kerja, dan koordinasi yang dilakukan dalam penanganan anak terlantar. Pengarahan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan perlindungan dan kesejahteraan anak.

4. Tindakan (Action)

Tindakan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan strategi yang telah dirumuskan. Geoff Mulgan menegaskan bahwa strategi tidak hanya terbatas pada tahap perencanaan, tetapi juga harus diwujudkan dalam berbagai kegiatan dan program yang dapat memberikan dampak nyata.¹⁹ Tindakan strategi mencakup pelaksanaan program,

¹⁸ 'Mulgan.'

¹⁹ 'Mulgan.'

pemberian pelayanan, pengambilan keputusan, serta penggunaan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan Tindakan yang tepat akan memengaruhi keberhasilan strategi dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini, Tindakan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dilihat melalui berbagai usaha yang dilakukan dalam menangani anak terlantar, seperti pendataan dan identifikasi anak terlantar, pejangkauan lapangan, asesmen kebutuhan anak, rehabilitas sosial, pedampingan, serta penempatan anak pada lembaga kesejahteraan sosial jika diperlukan.

5. Pembelajaran (Learning)

Pembelajaran merupakan indikator yang menunjukkan bahwa strategi bersifat dinamis dan terus berkembang. Menurut Geoff Mulgan, organisasi perlu melakukan evaluasi dan pembelajaran secara berkelanjutan agar strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan yang terus berubah.

Proses pembelajaran dilakukan melalui evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan untuk menyelesaikan keberhasilan maupun kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut kemudian digunakan sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan strategi pada masa yang akan datang.²⁰

Dalam penelitian ini, strategi pembelajaran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dapat dilihat menggunakan kegiatan monitoring serta evaluasi kepada program penanganan anak terlantar. Melalui proses tersebut, Dinas Sosial dapat mengidentifikasi berbagai

²⁰ 'Mulgan.'

faktor pendukung dan penghambat serta melakukan perbaikan guna meningkatkan efektivitas penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh.

2.4 Anak terlantar

2.4.1 Pengertian anak terlantar

Setiap anak menjadi bagian penting sebagai penerus bangsa yang berhak memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Demikian pula anak terlantar yang termasuk dalam kelompok anak yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, keluarga, dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjabarkan bahwa anak terlantar adalah anak yang kebutuhan dasarnya belum dapat terpenuhi layak, baik dalam aspek fisik, mental, sosial, dan juga spiritual.²¹

Menurut Suyanto, anak terlantar tidak hanya dipahami sebagai anak yang tidak mempunyai salah satu ataupun kedua orang tuanya. Seorang anak juga dapat dikategorikan sebagai anak terlantar Ketika hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara layak belum terpenuhi seperti hak memperoleh pendidikan yang baik, layanan Kesehatan yang memadai, serta kebutuhan dasar lainnya. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian orang tua, keterbatasan ekonomi keluarga, ketidakmampuan menjalankan fungsi pengasuhan, maupun berbagai faktor sosial lainnya. Dengan demikian, anak terlantar dapat dipahami sebagai anak yang disebabkan oleh

²¹ Muhamad Sirojutholibin, 'Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar Melalui Peran Dan Kontribusi Lembaga

berbagaikondisi belum memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, baik dari segi jasmani, rohani, maupun sosial.²²

2.4.2 Ciri ciri anak terlantar

Suyanto menjelaskan bahwa terdapat beberapa karakteristik yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi anak terlantar, yaitu:²³

1. Anak berusia antara 5 sampai 18 Tahun, termasuk anak yatim, piatu, maupun yatim piatu yang tidak memperoleh pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan secara memadai.
2. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, kemudian tidak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang layak karena orang tua tidak memiliki kesiapan secara psikologis maupun ekonomi untuk bertanggung jawab terhadap anak yang dilahirkan.
3. Anak yang kehadirannya tidak direncanakan atau tidak diharapkan oleh orang tua maupun keluarganya, sehingga berpotensi mengalami pengabaian, perlakuan yang kurang baik, serta minimnya perhatian dan kasih sayang.
4. Anak yang berasal dari keluarga miskin atau memiliki kondisi ekonomi yang rentan, sehingga orang tua mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti pendidikan, kesehatan, pangan, sandang, dan tempat tinggal yang layak.
5. Anak yang berasal dari keluarga yang menghadapi masalah sosial, seperti keluarga yang mengalami perceraian (broken home), kekerasan dalam rumah tangga,

²² Sirojutholibin.

²³ Sirojutholibin.

penyalahgunaan narkoba, kecanduan alkohol, pengangguran, atau berbagai masalah lainnya yang dapat menghambat pemenuhan hak-hak anak secara optimal.

2.4.3 Faktor faktor penyebab anak terlantar

Masih terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya keterlantaran pada anak, yaitu:²⁴

1. Faktor keluarga

Keluarga menjadi lingkungan pertama dan utama bagi anak dalam mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, dan anak yang memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan serta memberikan pengasuhan kepada anak. Apabila orang tua kurang memberikan perhatian, kasih sayang, dan pengawasan yang memadai, maka kondisi tersebut dapat menyebabkan anak merasa diabaikan dan berpotensi mengalami keterlantaran. Oleh sebab itu, keluarga memegang peran penting dalam mencegah terjadinya penelantaran anak.

2. Faktor Pendidikan

Pendidikan termasuk salah satu kebutuhan dasar yang penting bagi setiap anak. Namun, pada keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi, akses terhadap Pendidikan sering kali menjadi kurang optimal. Rendahnya tingkat Pendidikan orang tua serta keterbatasan biaya Pendidikan dapat menyebabkan anak tidak memperoleh kesempatan belajar yang layak. Kondisi ini dapat berdampak pada terhambatnya perkembangan anak dan meningkatkan resiko terjadinya keterlantaran.

3. Faktor sosial, politik, ekonomi

²⁴ 'Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru'.

Kondisi sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat turut memengaruhi kesejahteraan anak. Permasalahan ekonomi, seperti kemiskinan dan pengangguran, sering kali menyebabkan keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar anak. Selain itu, kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat rentan dapat menyebabkan keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap akses layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial bagi anak. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan jumlah anak yang mengalami keterlantaran.

4. Kelahiran diluar nikah

Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah sering menghadapi berbagai permasalahan sosial, termasuk kurangnya penerimaan dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, anak yang kelahirannya tidak direncanakan atau tidak diinginkan resiko tidak mendapatkan pengasuhan dan perhatian yang memadai dari orang tua. Kondisi tersebut dapat menyebabkan anak mengalami penelantaran serta tidak terpenuhinya kebutuhan dasar yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.

2.3. Kerangka Berpikir

Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar

Menurut pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

1. Bagaimana strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.
2. Apa saja faktor pendukung dan kendala yang dihadapi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam melaksanakan strategi penanganan anak terlantar

Teori Strategi

1. Tujuan
2. Lingkungan
3. Pengarahan
4. Tindakan
5. Pembelajaran

Hasil Penelitian

Rekomendasi

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilaksanakan untuk memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang beralamat di Kota Banda Aceh, provinsi Aceh.

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kesejahteraan sosial, termasuk dalam penanganan anak terlantar. Selain itu, Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalankan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan, rehabilitasi sosial, pembinaan, serta pelayanan bagi anak terlantar. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lokasi penelitian ini dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan untuk menganalisis strategi Dinas Sosial dalam menangani anak terlantar di Kota Banda Aceh.

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 2 Fokus Penelitian

NO	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Strategi	1. Tujuan 2. Lingkungan 3. Pengarahan 4. Tindakan 5. Pembelajaran	<i>Geoff Mulgan, The Art of Public Strategy: Mobilizing Power and Knowledge for the Common Good (New York, United States: Oxford University Press Inc, 2009).</i>

3.3. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deksriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian berdasarkan keadaan dan fakta yang ditemukan secara langsung di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, dapat menghasilkan data dalam bentuk keterangan, pendapat, serta berbagai informasi yang diperoleh malalui informan maupun sumber data lainnya, Metode deskriptif digunakan karena penelitian diarahkan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar. Melalui penelitian ini, peneliti berupaya mengumpulkan, mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berkaitan dengan pelaksanaan strategi penanganan anak terlantar serta berbagai faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya.²⁵

3.4. Metode Pengumpulan Data

1. wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan untuk memperoleh data melalui komunikasi langsung ntara peneliti dan informan. Teknik ini digunakan untuk menggali keterangan secara lebih jelas dan mendalam mengenai strategi, yang dilakukan dalam penanganan anak terlantar, selain memperoleh informasi mengenai strategi penanganan, wawancara juga digunakan untuk mengetahui berbagai faktor

²⁵ ‘Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, Hlm 64’, 2020.

yang mendukung serta faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh.²⁶

Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kabid Rehabilitas Sosial, menangani program anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebanyak 1 orang. Informan tersebut dipilih karena terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar.
- b. Penyuluhan sosial ahli muda menangani program anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebanyak 1 orang. Informan tersebut dipilih karena terlibat secara langsung dalam pelaksanaan program maupun kegiatan yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar.
- c. Anak terlantar atau anak yang pernah mendapatkan layanan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh (4 orang), untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman serta bentuk pelayanan yang diterima.
- d. Petugas rumah singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh (1 orang), karena terlibat secara langsung dalam proses penerimaan, pembinaan sementara, pendampingan, serta penanganan awal terhadap anak terlantar sebelum layanan lanjutan sesuai dengan kebutuhan anak.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap hal hal yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk

²⁶ ‘Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, Hlm 64’.

memperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan situasi yang berkaitan dengan penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh. Observasi juga dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengenai anak terlantar²⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Sumber tersebut dapat berupa seperti buku, jurnal ilmiah, penelitian terdahulu, dokumen resmi, laporan kegiatan, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penanganan anak terlantar. Selain itu, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dan dokumen yang diperoleh dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai bahan pendukung dalam penelitian.

3.5 Informan Penelitian

Tabel 3 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1.	Kabid. Rehabilitas Sosial	1 Orang
2.	Penyuluhan sosial ahli muda yang menangani program anak terlantar pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1 Orang
3.	Petugas rumah singgah bagi anak terlantar	1 Orang
4.	Anak terlantar atau anak yang pernah mendapatkan layanan dari Dinas Soaial Kota Banda Aceh	4 Orang

²⁷ 'Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, Hlm 64'.

3.6 Sumber Data

1. Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari informan atau pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta interaksi langsung dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh. Untuk membantu proses pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa alat pendukung, seperti buku catatan, alat tulis, dan alat perekam suara guna memperoleh informasi yang jelas dan mendalam mengenai strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berasal dari berbagai sumber yang telah tersedia sebelumnya. Data tersebut berupa buku, jurnal ilmiah, skripsi, artikel, laporan, dokumen resmi, peraturan perundang undangan, serta berbagai literatur lainnya yang berhubungan dengan penanganan anak terlantar dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Data sekunder dimanfaatkan sebagai pendukung dalam proses analisis serta sebagai dasar teori dalam penelitian mengenai strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan yang dilakukan untuk mengolah, memahami, informasi yang telah diperoleh selama proses penelitian sehingga dapat menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan secara penelitian selesai. Tahapan analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, dan mengelompokkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang dianggap relevan dengan fokus penelitian, yaitu strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar. Data yang telah diperoleh kemudian diringkas, dikategorikan, dan data yang telah dipilih kemudian dikelompokkan berdasarkan tema tertentu agar lebih mudah dipahami dan analisis. Dengan proses tersebut, peneliti dapat lebih fokus pada informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahapan untuk menata data yang telah melalui proses reduksi agar dapat dipahami dengan lebih mudah. Data yang telah dipilih disusun dalam bentuk yang sistematis sehingga hubungan antara informasi yang satu dengan informasi lainnya dapat terlihat dengan jelas. Dalam penelitian ini, data mengenai strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, termasuk faktor pendukung, serta faktor penghambat dalam penanganan anak terlantar disajikan secara deskriptif sehingga membantu peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti dan menarik kesimpulan yang tepat.

3. Penarikan kesimpulan data verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Kesimpulan dibuat berdasarkan informasi yang telah dilewati pada tahap sebelumnya telah melalui proses reduksi dan penyajian data. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu dengan mengkaji fakta fakta khusus yang ditemukan

dilanjutkan kemudian dirumuskan menjadi pemahaman yang lebih umum mengenai strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar. Selanjutnya, kesimpulan tersebut selanjutnya diverifikasi selama proses penelitian berlangsung. Verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa data yang menjadi dasar kesimpulan memiliki kebenaran dan dapat dipercaya.

3.8 Jadwal Penelitian

Tabel 4 Jadwal Penelitian

No	Rencana kegiatan penelitian	Okt 2025	Nov 2025	April 2026	Mei 2026	Juni 2026	Juli 2026	Agts 2026
1	Penyusunan proposal							
2	Seminar proposal							
3	Penelitian							
4	Penyusunan skripsi bab IV-V							

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dalam lingkungan pemerintah Kota Banda Aceh yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial. Dinas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Wali Kota Aceh Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh berlokasi di jalan Residen Danubroto Nomor 5, Gampong Lamlagang, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.

Sebagai yang bertanggung jawab di bidang kesejahteraan sosial, Dinas Sosial mempunyai peran penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada kelompok yang mengalami permasalahan sosial, termasuk anak terlantar. Keberadaan Dinas Sosial merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial serta menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan pelayanan sosial. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016, Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah di bidang sosial yang menjadi kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh serta melaksanakan tugas tersebut.²⁸

²⁸ Dinas Sosial Kota Banda Aceh, 'Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>>.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki sejumlah kewenangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016. Kewenangan tersebut meliputi:²⁹

1. Menerbitkan izin pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
3. Melaksanakan pembinaan terhadap Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) sebagai lembaga yang berperan dalam memberikan pelayanan konsultasi bagi keluarga yang menghadapi berbagai permasalahan sosial.
4. Memfasilitasi proses pemulangan warga negara migran yang menjadi korban kekerasan dari titik debarkasi di wilayah Kota Banda Aceh menuju daerah asalnya.
5. Menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan sosial, tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif (NAPZA), serta Orang dengan *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)* yang tidak memerlukan rehabilitasi di dalam panti. Selain itu, Dinas Sosial juga memberikan rehabilitasi kepada anak yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan kewenangannya.

²⁹ Dinas Sosial and Kota Banda, 'Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh', 2016.

6. Melaksanakan pemeliharaan dan penanganan terhadap anak-anak terlantar melalui berbagai program pelayanan sosial, rehabilitasi, pendampingan, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak.
7. Melakukan pendataan verifikasi, validasi, dan pengelolaan data fakir miskin sebagai dasar dalam penyaluran bantuan sosial maupun penyusunan program kesejahteraan sosial.
8. Menyediakan kebutuhan dasar serta memberikan layanan pemulihan trauma bagi masyarakat yang menjadi korban bencana alam maupun bencana sosial.
9. Menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui berbagai bentuk pembinaan dan pelatihan.
10. Melaksanakan pengelolaan serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan para pahlawan bangsa.

Salah satu tugas yang menjadi fokus Dinas Sosial adalah memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak-anak terlantar. Tugas tersebut dilaksanakan melalui berbagai bentuk pelayanan sosial, seperti pendataan asmen kebutuhan anak, rehabilitasi sosial, pendampingan, serta koordinasi dengan lembaga kesejahteraan sosial maupun instansi terkait. Upaya tersebut dilakukan agar anak-anak yang mengalami keterlantaran tetap mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, yang meliputi hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, perlindungan dan kehidupan yang layak.

³⁰Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Banda Aceh turut menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak, seperti kepolisian, Satpol PP dan WH, Dinas pemberdayaan

³⁰ 'Bidang Rehabilitasi Sosial' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/bidang-rehabilitasi-sosial/>>.

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Balai Rehabilitasi Sosial, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA), serta organisasi masyarakat yang berfokus pada bidang perlindungan anak. Kerja sama tersebut dilakukan agar penanganan anak terlantar dapat berjalan lebih efektif karena permasalahan keterlantaran anak tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Melalui berbagai program dan pelayanan yang dilaksanakan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh berupaya mengurangi jumlah anak terlantar sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Namun demikian, masih ditemukannya anak terlantar di beberapa wilayah Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum sepenuhnya dapat di atasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tepat serta koordinasi yang berkelanjutan agar penanganan anak terlantar dapat dilakukan secara efektif serta dapat memberikan perlindungan yang optimal kepada setiap anak.

4.1.4. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Dalam Pelaksanaanya, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki visi, misi, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang relavan dengan tugas tugasnya:³¹

1. Visi:

“Meningkatkan Kesejahteraan sosial”

2. Misi:

³¹ ‘Visi & Misi Dinas Sosial’ <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>>.

Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan sosial, meningkatkan peran serta dan potensi sumber kesejahteraan.

3. Tujuan:

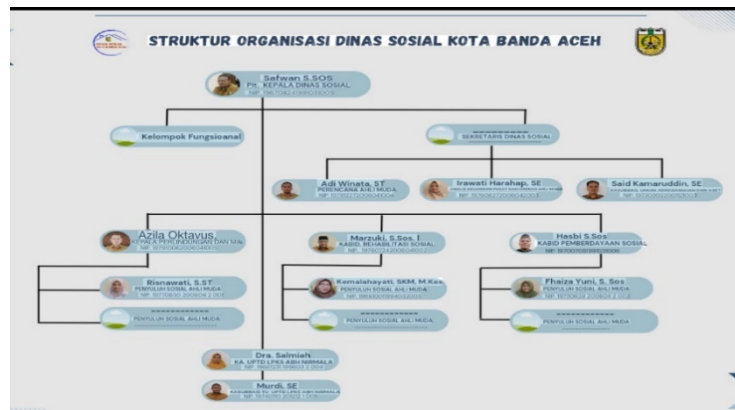
Meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial

4. Sasaran:

- a. Meningkatkan penanganan permasalahan sosial.
- b. Persentase lembaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
- c. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial.
- d. Strategi:
 - a. Membangun jaringan kemitraan lintas sektoral dalam upaya penanganan permasalahan sosial.
 - b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan dunia usaha dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
 - c. Meningkatkan partisipasi tenaga kesejahteraan sosial dalam memberikan pelayanan sesuai dengan Perundang undangan.
- e. Arah kebijakan:
 - a. Menyusun regulasi mengenai penanganan masalah sosial.
 - b. Melibatkan masyarakat/ dunia dalam upaya pengentasan PMKS.
 - c. Optimalisasi SDM tenaga kesejahteraan sosial melalui bimtek/ pelatihan sesuai dengan standar pelayanan kesejahteraan sosial.

4.1.4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, pimpinan tertinggi berada pada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial, yang bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, serta mengevaluasi seluruh pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, kepala Dinas dibantu oleh Sekretaris Dinas yang bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi perkantoran.³²

Sekretariat terdiri atas beberapa subbagian di antaranya:

1. Perencanaan
2. Keuangan
3. Umum
4. Kepegawaian

³² 'Pejabat Struktural' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/pejabat-struktural/>>.

5. Pengelola asset

Keberadaan secretariat berperan penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas seluruh bidang yang ada di Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Selanjutnya Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki beberapa bidang yang menangani pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan pada masing masing pihak, yaitu Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, dan Bidang Pemberdayaan Sosial. Stiap bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang yang didukung oleh tenaga fungsional, seperti penyuluh sosial ahli muda, yang bertugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, pendampingan, serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan bidang kerjanya. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial bertugas melaksanakan perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami kerentanan sosial maupun korban bencana. Bidang rehabilitas sosial bertanggung jawab memberikan layanan rehabilitas bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, serta kelompok rentan lainnya. Sementara itu, Bidang Pemberdayaan Sosial memiliki tugas meningkatkan kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan potensi sumber daya kesejahteraan sosial, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selain itu, dalam struktur organisasi juga terdapat Kelompok Jabatan Fungsional yang membantu pelaksanaan tugas sesuai dengan keahlian dan kompetensi masing masing. Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga membawahi UPTD LPKS ABH Nirmala, yang dipimpin oleh seorang kepala UPTD. Unit ini berperan dalam memberikan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, serta perlindungan kepada anak yang

membutuhkan perlindungan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan struktur organisasi tersebut, dapat dilihat bahwa setiap unsur organisasi memiliki tugas dan fungsi yang saling berhubungan dalam mendukung pelaksanaan pelayanan sosial Kota Banda Aceh.

4.1.5. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

a. Tugas

Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah salah satu unsur pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang sosial. Keberadaan dinas ini berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlindungan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 21016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Sosial bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Dinas Sosial bertanggung jawab Menyusun kebijakan, merencanakan program, melaksanakan pelayanan sosial, melakukan pembinaan, pengawasan, serta mengevaluasi berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesejahteraan sosial. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah memberikan perlindungan dan pelayanan kepada kelompok masyarakat rentan, termasuk anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia, fakir

miskin, korban bencana, serta kelompok masyarakat lain yang membutuhkan penanganan sosial.

b. Fungsi

Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki beberapa fungsi yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan sosial. Fungsi tersebut meliputi:

1. Merumuskan kebijakan di bidang sosial sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan kesejahteraan sosial.
2. Mengimplementasikan kebijakan di bidang sosial dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Melaksanakan monitoring, evaluasi, serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas kinerja yang telah dilaksanakan.
4. Menyelenggarakan administrasi Dinas Sosial yang meliputi pengelolaan keuangan, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, serta administrasi umum lainnya sesuai dengan lingkup tugas dinas.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota Banda Aceh sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Sosial.

4.1.6. Data Anak Terlantar yang Ditangani Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2021-2024

Salah satu bentuk pelayanan yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah penanganan terhadap anak yang mengalami keterlantaran. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi anak terlantar yang ditangani oleh Dinas

Sosial Kota Banda Aceh, berikut disajikan data jumlah anak terlantar selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Data ini diperoleh dari dinas Sosial Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan jumlah anak yang mengalami keterlantaran yang mendapatkan penanganan setiap tahunnya.

Tabel 5 Data Anak Terlantar yang Ditangani Dinas Sosial Kota Banda Aceh Tahun 2024-2025

Data Tahun 2024			
NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1.	SA	Banda Aceh, 26-22-2015	Peuniti Banda Aceh
2.	KO	Banda Aceh, 10-10-2020	Peuniti Banda Aceh
3.	KH	Banda Aceh, 02-06-2022	Peuniti Banda Aceh
4.	MH	Geuceu, 02-04-2007	Lubok Lambaro Aceh
5.	AL	Bireun 2008	Peuniti Banda Aceh
6.	MF	Pulo Aceh, 16-09-2007	Ulee lee Banda Aceh
7.	MA	Aceh Timur, 07-06-2008	Emperom Banda Aceh
8.	AB	Kp. Neuheun, 2018	Neuheun kp Pie
9.	SL	Medan, 2010	Medan
Data Tahun 2025			
NO	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Alamat
1.	AM	Aceh Tamiang, 04-08-2022	Ujong Batee
2.	AF	Aceh Tamiang, 14-06-2024	Ujong Batee
3.	MR	Aceh Tenggara, 2013	Aceh Tenggara
4.	CAY	Aceh Tenggara, 2019	Aceh Tenggara

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jumlah anak terlantar yang ditangani oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengalami fluktuasi selama periode tahun 2024-2025. Pada tahun 2024 tercatat sebanyak 9 anak terlantar yang di tangani, sedangkan pada tahun 2025 jumlah tersebut menurunkan menjadi 4 anak. Perurunan jumlah anak terlantar yang di tangani menunjukkan adanya perubahan jumlah kasus

yang tercatat pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama periode tersebut. Meskipun mengalami penurunan, permasalahan anak terlantar masih menjadi salah satu persoalan kesejahteraan sosial yang memerlukan perhatian dari pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi salah satu landasan bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk terus meningkatkan efektivitas penanganan anak terlantar melalui berbagai program pelayanan sosial, rehabilitasi sosial, pendampingan, serta kerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Selain data mengenai jumlah anak terlantar yang ditangani setiap tahun, Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi seorang anak berada dalam kondisi terlantar. Faktor faktor tersebut diperoleh melalui proses asasmen yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial terhadap anak maupun keluarganya.

Table 1 Faktor Penyebab Anak Terlantar Berdasarkan Hasil Asasmen Dinas Sosial

Faktor penyebab	Keterangan
Kemiskinan	Keterbatasan orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak
Penceraian	Anak tidak memperoleh pengasuhan yang memadai
Orang tua meninggal dunia	Anak kehilangan pengasuh utama
Penyalahgunaan narkoba	Orang tua menelantarkan anak
Anak jalanan	Tidak memperoleh perlindungan keluarga

Berdasarkan Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa penyebab anak terlantar di kota Banda aceh cukup beragam. Kondisi ekonomi keluarga menjadi penyebab yang paling sering ditemukan, diikuti oleh perceraian orang tua, meninggalnya orang itu, penyalahgunaan narkoba, serta kondisi anak yang hidup di jalanan tanpa memperoleh pengasuhan yang layak. Beragamnya faktor penyebab tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kondisi anak terlantar tidak hanya disebabkan oleh kondisi ekonomi, melainkan juga dipengaruhi disebabkan kondisi sosial sosial, keadaan keluarga, dan pola pengasuhan kedua orang tua. Dengan demikian, penanganan anak terlantar memerlukan pendekatan sehingga komprehensif melalui kerja sama berbagai pihak.

4.3. Hasil Penelitian

4.4.1. Alur Penanganan Anak Terlantar oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yang melibatkan Dinas Sosial dan instansi terkait. Penanganan diawali Ketika anak terlantar ditemukan di tempat umum atau di jalan. Penjangkuan dilakukan oleh instansi terkait, seperti Satpol PP bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), kemudian anak dibawa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Setelah anak dijangkau, dilakukan proses registrasi dan asmsen untuk mengetahui identitas, kondisi, latar belakang keluarga, serta kebutuhan anak. Hasil asmsen digunakan sebagai dasar untuk menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi masing masing anak. Informan menjelaskan bahwa anak yang telah dijangkau kemudian dibawa ke Rumah Singgah untuk memperoleh pelayanan sementara.

Selama berada di Rumah Singgah, anak mendapatkan kebutuhan dasar berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal sementara, serta pembinaan. Selama penanganan di Rumah Singgah disesuaikan dengan kondisi anak, dengan penanganan pada umumnya berlangsung antara satu sampai tujuh hari. Namun untuk kasus tertentu, masa penanganan dapat diperpanjang dengan mencari alternatif penyelesaian memulai kerja sama dengan pihak terkait. Apabila anak masih memiliki keluarga atau wali, Dinas Sosial melakukan penelusuran keluarga untuk mengetahui keberadaan dan kondisi keluarga yang dapat memberikan pengasuhan. Penelusuran tidak hanya dilakukan terhadap orang tua, tetapi juga dapat dilakukan terhadap keluarga lainnya yang masih memiliki hubungan dengan anak. Setelah wali ditemukan, Dinas Sosial melakukan asesmen terhadap kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan memberikan pengasuhan kepada anak.

Apabila keluarga dinilai masih mampu memberikan pengasuhan yang layak, anak dapat dikembalikan kepada keluarga setelah memperoleh pembinaan. Namun, apabila keluarga tidak mampu atau kondisi anak membutuhkan pengasuhan lebih lanjut, Dinas Sosial dapat memberikan solusi berupa penempatan anak pada lembaga sosial atau panti yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain penanganan melalui Rumah Singgah dan panti sosial, Dinas Sosial juga melakukan kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang dikelola oleh masyarakat. Kerja sama tersebut menjadi salah satu alternatif ketika kapasitas pelayanan pemerintah terbatas atau Ketika anak membutuhkan bentuk pelayanan tertentu. Dengan demikian, alur penanganan anak terlantar tidak hanya dilakukan melalui satu bentuk pelayanan, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing masing anak.

4.4.2. Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Penanganan Anak Terlantar

a. Tujuan (Goals)

Indikator tujuan (goals) menjelaskan arah yang ingin dicapai oleh suatu organisasi melalui strategi yang dijalankan. Dalam penelitian ini, tujuan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar dapat dilihat dari sasaran yang ingin diwujudkan, yaitu memberikan perlindungan, serta memenuhi hak-hak anak, serta mengembalikan fungsi sosial anak guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka secara layak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kemalayani selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banda Aceh, diketahui bahwa tujuan utama penanganan anak terlantar adalah memberikan perlindungan kepada anak agar tidak terus berada dalam kondisi yang membahayakan serta memastikan kebutuhan dasar anak dapat terpenuhi. Penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelamatan anak dari jaman jalanan, tetapi juga memberikan pembinaan kepada keluarga agar mampu menjalankan tanggung jawab terhadap anak.

Ibu Kemalayani menyatakan bahwa:

“Tujuan utama penanganan anak terlantar adalah agar anak mendapatkan perlindungan, pendidikan, kebutuhan dasar, serta Kembali memperoleh pengasuhan yang layak. Jika masih memungkinkan anak dikembalikan kepada keluarga setelah orang tua diberikan pembinaan.”³³

³³ ‘Hasil Wawancara Dengan Ibu Kemalayani Pada Tanggal 6, Juli 2026’.

Dari hasil wawancara oleh Ibu Kemalahayati hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Junaidi sebagai Pengelola Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Menurut beliau, anak yang berada di rumah singgah akan memperoleh pembinaan sementara sebelum ditempatkan ke Panti Sosial Anak Nanggroe apabila membutuhkan pengasuhan lebih lanjut.

Bapak Junaidi menyatakan bahwa:

“Kalau anak terlantar di sini biasanya tiga hari. Setelah pembinaan, anak dibawa ke Aneuk Nanggroe supaya ada tempat tinggal, sekolah, dan semua kebutuhannya terpenuhi sampai selesai SMA.”³⁴

Berdasarkan hasil wawancara kedua informan dapat diketahui bahwa tujuan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah memberikan perlindungan kepada anak terlantar melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan, serta pengembalian fungsi sosial anak. Selain itu, Dinas Sosial juga berupaya mengembalikan anak kepada keluarga apabila kondisi keluarga dinilai mampu memberikan pengasuhan yang layak. Apabila tidak memungkinkan, anak akan ditempatkan di panti sosial agar tetap memperoleh hak hak sebagai anak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh diarahkan pada kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh program penanganan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah secara sementara, tetapi juga bertujuan menjamin keberlangsungan kehidupan anak melalui pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa indikator goals menurut Geoff Mulgan telah

³⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Petugas Rumah Singgah Pada Tanggal 21 Juli 2026’.

diterapkan karena organisasi memiliki tujuan yang jelas sebagai dasar dalam melaksanakan setiap Tindakan penanganan anak terlantar.

b. Lingkungan (Environment)

Indikator lingkungan (environment) berkaitan dengan kemampuan organisasi memahami kondisi internal maupun eksternal yang memengaruhi pelaksanaan strategi. Berdasarkan hasil wawancara Marzuki selaku Kabid. Rehabilitasi Sosial, diketahui bahwa penyebab anak terlantar cukup beragam, mulai dari kemiskinan, kurangnya pengawasan orang tua, masalah keluarga, hingga kondisi ekonomi yang memaksa orang tua bekerja sehingga anak kurang perhatian.

Bapak Marzuki menyatakan bahwa:

“Penyebab anak terlantar bukan hanya karena kemiskinan, tetapi juga karena kurangnya perhatian orang tua, kondisi keluarga yang bermasalah, dan faktor lingkungan tempat anak tumbuh.”³⁵

Ibu Kemalahayati Menyatakan bahwa:

“Penyebab anak terlantar itu bermacam macam, mulai dari faktor ekonomi keluarga, pendidikan orang tua yang rendah, perceraian, pola asuh yang kurang harmonis, bahkan terdapat orang tua yang memanfaatkan anaknya untuk mencari uang. Dan Kami pernah menemukan anak yang sengaja disuruh mengemis oleh orang tuanya. Setelah dilakukan asasmen, diketahui bahwa uang hasil mengemis tersebut digunakan oleh orang tuanya untuk membeli narkoba”³⁶

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Junaidi.

Bapak Junaidi Menyatakan bahwa:

³⁵ ‘Hasil Wawancara Bersama Kabid Rehabilitas Sosial Pada Tanggal 6 Juli 2026’.

³⁶ ‘Hasil Wawancara Bersama Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Tanggal 6 Juli 2026’.

“Banyak orang yang dating ke Banda Aceh mencari rezeki. Karena tidak punya tempat tinggal akhhirnya tinggal di bawah jembatan. Ada juga anak yang diterlantarkan karena orang tuanya sibuk bekerja.”³⁷

Hal yang di sampaikan oleh salah satu anak terlantar

Ia menyatakan bahwa:

“Orang tua saya sering menyuruh saya meminta minta di jalan. Kalau saya tidak mau, saya dimarahi. Uang yang saya dapat harus saya berikan semuanya kepada orang tua. Dan uang itu dipergunakan untuk membeli narkoba orang tua saya.”³⁸

Berdasarkan temuan dari wawancara kedua informan menunjukkan bahwa lingkungan menjadi penyebab penting yang memengaruhi munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh. Kondisi ekonomi keluarga, urbanisasi, lemahnya pengawasan orang tua, serta lingkungan sesial menjadi penyebab yang sering ditemui dalam penanganan kasus anak terlantar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan yang melatar belakangi terjadinya keterlantaran anak. Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak terbatas pada pemberian pelayanan kepada anak, melainkan juga melakukan pendekatan bagi keluarga dan koordinasi dengan instansi lain. Hal ini sesuai dengan indikator environment menurut Geoff Mulgan yang menekankan sangat penting memahami kondisi lingkungan sebagai dasar dalam merumuskan strategi.

c. Pengarahan (Direction)

³⁷ ‘Hasil Wawancara Dengan Petugas Rumah Singgah Pada Tanggal 21 Juli 2026’.

³⁸ ‘Hasil Wawancara Bersama Anak Terlantar Pada Tanggal 20 Juli 2026’.

Pengarahan merupakan indikator yang menunjukkan bagaimana suatu strategi diarahkan melalui kebijakan, koordinasi, serta pembagian tugas agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam penanganan anak terlantar, pengarahan menjadi bagian penting karena meliputi berbagai pihak yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan bagiannya.

Sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati selaku Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Kota Banda Aceh, diketahui bahwa pelaksanaan penanganan anak terlantar telah memiliki mekanisme kerja yang jelas. Dinas Sosial tidak melakukan penjangkauan secara langsung, melainkan bekerja sama dengan Satpol PP dan Tim Rekasi Cepat (TRC). Setelah anak ditemukan, anak dibawa ke rumah singgah untuk dilakukan asmsen, pembinaan, dan penentuan langkah penanganan selanjutnya sesuai dengan kondisi anak.

Ibu Kemalahayati menyatakan bahwa:

“Biasanya Satpol PP bersama Tim Rekasi Cepat yang melakukan penjangkauan. Setelah itu anak dibawa ke Rumah Singgah untuk dilakukan asmsen dan pembinaan. Dari hasil asmsen tersebut baru diputuskan apakah anak dikembalikan kepada keluarga atau ditempatkan di panti sosial.”³⁹

Pertanyaan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan Bapak Junaidi, beliau menjelaskan bahwa Rumah Singgah menjadi tempat pembinaan sementara sebelum anak memperoleh penanganan lanjutan sesuai dengan hasil asmsen.

Bapak Junaidi menyatakan bahwa:

“Di Rumah Singgah anak dibina sekitar tiga hari. Setelah itu, kalau memang membutuhkan pengasuhan lebih lanjut akan dibawa ke Panti Sosial Aneuk Nanggroe. Kalau masih ada keluarganya.”⁴⁰

³⁹ ‘Hasil Wawancara Bersama Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Tanggal 6 Juli 2026’.

⁴⁰ ‘Hasil Wawancara Dengan Petugas Rumah Singgah Pada Tanggal 21 Juli 2026’.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan menunjukkan bahwa pengarahannya strategi dalam penanganan anak terlantar telah dilaksanakan melalui pembagian tugas yang jelas antar instansi. Satpol PP dan Tim Rekasi Cepat bertugas melakukan penjangkuan, sedangkan Dinas Sosial melalui Rumah Singgah melaksanakan asamen, pembinaan, dan menentukan bentuk penanganan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak. Mekanisme tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik sehingga setiap pihak menjalankan perannya masing-masing dalam proses penanganan anak terlantar.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa pengarahannya strategi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah berjalan berdasarkan mekanisme yang ditetapkan. Setiap tahapan penanganan dilakukan berdasarkan pembagian tugas dan koordinasi antar instansi sehingga pelayanan kepada anak terlantar dapat dilaksanakan secara terarah. Adanya asamen sebelum menentukan bentuk penanganan menunjukkan bahwa setiap keputusan didasarkan pada kondisi nyata yang dialami anak, bukan dilakukan secara umum atau seragam. Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa indikator pengarahannya (direction) menurut Geoff Mulgan telah diterapkan melalui koordinasi, pembagian, peran, serta produser kerja yang jelas dalam penanganan anak terlantar.

d. Tindakan (Action)

Tindakan (action) merupakan bentuk pelaksanaan nyata dari strategi yang telah dirumuskan. Dalam penanganan anak terlantar, Tindakan Dinas Sosial tidak hanya berupa penjangkuan, tetapi juga meliputi asamen pembinaan, pemenuhan

kebutuhan dasar, hingga penempatan anak pada lembaga yang sesuai dengan kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati, diketahui bahwa setelah anak terlantar diserahkan ke Dinas Sosial, anak terlebih dahulu menjalani proses registrasi dan asasmen. Selanjutnya anak memperoleh pembinaan, kebutuhan dasar, serta pendampingan sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Ibu Kemalahayati menyatakan bahwa:

“Setelah anak dibawa ke Rumah Singgah dilakukan registrasi, asasmen, kemudian diberikan pembinaan. Anak juga mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal sementara, serta bimbingan. Apabila orang tuanya masih ada, kami memanggil orang tua untuk diberikan pembinaan. Jika orang tua tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya, maka anak dapat ditempatkan di panti sosial.”⁴¹

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Junaidi, yang menjelaskan bahwa Rumah Singgah hanya menjadi tempat pembinaan sementara sebelum anak memperoleh penanganan lanjutan.

Bapak Junaidi menyatakan bahwa:

“Anak biasanya berada di Rumah Singgah selama tiga hari untuk mengikuti pembinaan. Setelah itu anak dibawa ke Panti Sosial Aneuk Nangroe agar memperoleh pendidikan, tempat tinggal, dan pembinaan sampai selesai sekolah. Kalau masih ada keluarga yang bisa mengasuh, anak dipulangkan setelah dilakukan pembinaan terhadap keluarganya.”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua informan, tindakan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu pengjangkuan oleh

⁴¹ ‘Hasil Wawancara Bersama Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Tanggal 6 Juli 2026’.

⁴² ‘Hasil Wawancara Dengan Petugas Rumah Singgah Pada Tanggal 21 Juli 2026’.

instansi terkait, registrasi, asasmen, pembinaan di Rumah Singgah, pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan terhadap keluarga, serta penempatan anak ke Panti Sosial Aneuk Nanggroe apabila diperlukan. Selain itu, dinas Sosial juga melakukan reunifikasi atau pemulangan anak kepada keluarga apabila kondisi keluarga dinilai masih mampu memberikan pengasuhan yang layak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindakan yang dilakukan Dinas Sosial bukan hanya berorientasi pada penyelamatan anak dari kondisi terlantar, namun juga diarahkan dalam pemulihan fungsi sosial anak melalui pembinaan, pendidikan, dan pemenuhan hak hak dasar anak. Seluruh Tindakan tersebut dilaksanakan secara bertahap berdasarkan hasil asasmen sehingga bentuk pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan setiap anak. Dengan demikian, Tindakan yang dilakukan telah mencerminkan implementasi strategi sebagaimana dijelaskan oleh Geoff Mulgan, yaitu strategi yang diwujudkan melalui program dan kegiatan nyata yang memberikan manfaat langsung kepada sasaran program.

e. Pembelajaran (Learning)

Pembelajaran (learning) merupakan indikator yang menunjukkan adanya evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan terhadap strategi yang telah dijalankan. Organisasi perlu belajar dari pengalaman agar strategi yang diterapkan semakin efektif dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Kemalahayati, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial melakukan evaluasi terhadap setiap penanganan kasus anak terlantar. Evaluasi dilakukan mengetahui perkembangan anak setelah memperoleh pelayanan serta menilai efektivitas langkah langkah yang telah dilakukan.

Ibu Kemalahayati menyatakan bahwa:

“Setiap penanganan tentu kami evaluasi. Kami melihat perkembangan anak setelah dipulangkan kepada keluarga ataupun setelah ditempatkan di panti. Dari situ kami mengetahui apakah penanganan yang dilakukan sudah berhasil atau masih perlu tindak lanjut.”⁴³

Sementara itu, Bapak Junaidi menjelaskan bahwa selama anak berada di Rumah Singgah dilakukan pembinaan sebagai proses awal sebelum anak menjalani penanganan lanjutan. Menurutnya, pengalaman dalam menangani berbagai kasus menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada anak terlantar.

Bapak Junaidi menyatakan bahwa:

“Setiap anak yang masuk tentu berbeda beda permasalahannya. Karena itu kami memberikan pembinaan sesuai kebutuhannya dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial agar penanganan tepat.”⁴⁴

Hasil wawancara dengan kedua informan menjelaskan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh menerapkan pembelajaran melalui proses evaluasi terhadap setiap kasus anak terlantar yang ditangani. Evaluasi tersebut dilakukan dengan melihat perkembangan anak setelah memperoleh pelayanan, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, serta menyesuaikan bentuk penanganan berdasarkan kondisi yang dihadapi oleh setiap anak. Pengalaman dalam menangani berbagai kasus juga menjadi dasar bagi Dinas Sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada penanganan berikutnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran menjadi salah satu unsur penting dalam strategi penanganan anak terlantar di Kota Banda Aceh. Evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan memungkinkan Dinas Sosial mengetahui keberhasilan maupun kendala yang dihadapi selama proses penanganan sehingga dapat dilakukan

⁴³ ‘Hasil Wawancara Bersama Penyuluh Sosial Ahli Muda Pada Tanggal 6 Juli 2026’.

⁴⁴ ‘Hasil Wawancara Dengan Petugas Rumah Singgah Pada Tanggal 21 Juli 2026’.

perbaikan pada program berikutnya. Selain itu, koordinasi dengan berbagai instansi dan lembaga sosial turut mendukung pengembangan strategi agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi di lapangan. Temuan ini menunjukkan bahwa indikator pembelajaran (learning) menurut Goff Mulgan telah diterapkan melalui evaluasi, koordinasi, dan upaya perbaikan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam penanganan anak terlantar.

4.4.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar dilaksanakan melalui serangkaian upaya yang saling berkaitan, mulai dari penjangkauan, registrasi dan pendataan, asesmen, pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, pembinaan keluarga, hingga penentuan penanganan lanjutan bagi anak. Penanganan tersebut pada dasarnya diarahkan untuk memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak terlantar serta membantu mengembalikan fungsi sosial anak agar dapat memperoleh kehidupan, pengasuhan, pendidikan, dan lingkungan yang lebih layak. Dengan demikian, strategi yang dilakukan Dinas Sosial tidak hanya berfokus pada penanganan anak ketika ditemukan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan kondisi anak setelah mendapatkan pelayanan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki tujuan untuk memastikan anak terlantar memperoleh perlindungan dan pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, tempat tinggal sementara, pembinaan, pendampingan, serta keberlanjutan pendidikan. Tujuan tersebut juga terlihat dalam upaya Dinas Sosial untuk

menentukan bentuk penanganan yang sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Apabila berdasarkan hasil asesmen keluarga masih dinilai mampu memberikan pengasuhan yang layak, maka anak diarahkan untuk dikembalikan kepada keluarga setelah melalui proses pembinaan. Namun, apabila anak tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga atau membutuhkan pengasuhan dan pendidikan lebih lanjut, maka penanganan dapat dilanjutkan melalui lembaga sosial yang sesuai, seperti Panti Sosial Aneuk Nanggroe. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan Dinas Sosial tidak hanya menyelesaikan permasalahan anak pada saat ditemukan, tetapi juga berupaya memastikan adanya keberlanjutan perlindungan dan perkembangan anak.

Strategi tersebut juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan sosial yang menjadi latar belakang munculnya anak terlantar di Kota Banda Aceh. Berdasarkan hasil penelitian, keterlantaran anak dapat disebabkan oleh berbagai kondisi, antara lain kemiskinan, rendahnya pendidikan orang tua, perceraian, pola asuh yang kurang baik, kurangnya pengawasan orang tua, urbanisasi, serta penyalahgunaan narkoba. Dalam beberapa kasus, ditemukan pula kondisi anak yang dimanfaatkan oleh orang tua untuk meminta-minta, sedangkan hasil yang diperoleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan orang tua, termasuk membeli narkoba. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan anak terlantar merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Sosial perlu memahami latar belakang dan kondisi setiap anak sebelum menentukan bentuk penanganan yang akan diberikan.

Pemahaman terhadap kondisi tersebut dilakukan melalui proses asesmen. Setelah anak dijangkau, Dinas Sosial melakukan registrasi dan pendataan untuk memperoleh informasi mengenai identitas serta kondisi anak. Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui latar belakang keluarga, permasalahan yang dihadapi, kondisi sosial, serta kebutuhan anak. Hasil asesmen menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam menentukan bentuk pelayanan dan penanganan yang sesuai. Dengan demikian, pelayanan yang diberikan tidak dilakukan secara sama terhadap seluruh anak, tetapi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. Kondisi lingkungan sosial yang beragam juga menyebabkan Dinas Sosial tidak cukup hanya memberikan pelayanan kepada anak, tetapi perlu melakukan pembinaan terhadap keluarga dan menjalin koordinasi dengan pihak lain agar permasalahan yang menjadi penyebab keterlantaran dapat ditangani secara lebih menyeluruh.

Pelaksanaan strategi tersebut selanjutnya terlihat dari adanya pembagian tugas dan koordinasi antara Dinas Sosial dengan pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan anak terlantar. Proses penjangkauan anak dilakukan oleh Satpol PP/WH dan Tim Reaksi Cepat yang bekerja sama dengan Dinas Sosial. Setelah anak ditemukan, anak kemudian dibawa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut melalui Rumah Singgah. Di Rumah Singgah dilakukan registrasi, pendataan, asesmen, dan pembinaan awal. Dalam proses tersebut, Dinas Sosial memiliki peran penting dalam melakukan asesmen, memenuhi kebutuhan dasar anak, memberikan pembinaan dan pendampingan, serta menentukan tindak lanjut berdasarkan kondisi anak. Pembagian tugas dan koordinasi tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar merupakan proses yang melibatkan

beberapa pihak, sehingga tidak seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh Dinas Sosial secara sendiri.

Dari sisi tindakan, strategi Dinas Sosial diwujudkan melalui tahapan penanganan yang dilakukan secara bertahap. Setelah anak berada di Rumah Singgah, Dinas Sosial berupaya memenuhi kebutuhan dasar anak berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara. Anak juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan selama berada dalam proses penanganan. Berdasarkan hasil penelitian, anak biasanya berada di Rumah Singgah sekitar tiga hari sebelum ditentukan penanganan selanjutnya. Jangka waktu tersebut digunakan untuk mengetahui kondisi anak dan menentukan langkah yang paling sesuai berdasarkan hasil asesmen. Apabila anak masih memiliki keluarga yang mampu memberikan pengasuhan yang layak, maka Dinas Sosial melakukan pembinaan dan mengupayakan reunifikasi atau pemulangan anak kepada keluarga. Sementara itu, apabila anak tidak memungkinkan untuk dikembalikan kepada keluarga dan membutuhkan pengasuhan serta pendidikan lebih lanjut, anak dapat ditempatkan di Panti Sosial Aneuk Nanggroe untuk memperoleh tempat tinggal, pendidikan, pembinaan, dan kebutuhan lainnya sampai menyelesaikan pendidikan.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilihat bahwa strategi Dinas Sosial tidak berhenti pada tahap penjangkauan atau pemberian bantuan sementara, tetapi berlanjut sampai adanya keputusan mengenai masa depan anak. Setiap tahapan penanganan memiliki keterkaitan dengan tahapan lainnya. Hasil penjangkauan menjadi dasar untuk dilakukan registrasi dan asesmen, hasil asesmen menjadi dasar dalam menentukan bentuk pembinaan dan pelayanan, sedangkan hasil penanganan menjadi dasar dalam

menentukan apakah anak dikembalikan kepada keluarga atau ditempatkan pada lembaga sosial. Alur tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial berusaha melaksanakan penanganan secara terarah berdasarkan kondisi dan kebutuhan anak.

Selain pelaksanaan tindakan, strategi Dinas Sosial juga terlihat melalui proses evaluasi dan pembelajaran dari penanganan yang telah dilakukan. Setiap anak memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda sehingga pendekatan dalam penanganannya tidak dapat disamakan. Perkembangan anak setelah memperoleh pelayanan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan terhadap anak yang dikembalikan kepada keluarga maupun anak yang ditempatkan pada lembaga sosial. Pengalaman Dinas Sosial dalam menangani berbagai kondisi anak menjadi bahan untuk menentukan tindakan yang lebih sesuai dalam penanganan berikutnya. Koordinasi dengan pihak terkait juga mendukung proses pembelajaran karena Dinas Sosial dapat memperoleh informasi dan dukungan dalam menentukan langkah penanganan yang tepat.

Jika dikaitkan dengan konsep strategi Geoff Mulgan, hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar telah mencerminkan unsur tujuan, pemahaman terhadap lingkungan, pengarahan, tindakan, dan pembelajaran. Tujuan terlihat dari upaya memberikan perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, pembinaan, serta pengembalian fungsi sosial anak. Pemahaman terhadap lingkungan terlihat dari proses asesmen yang mempertimbangkan kondisi anak dan latar belakang keluarganya. Pengarahan terlihat melalui pembagian tugas dan koordinasi antar pihak yang terlibat. Tindakan diwujudkan

melalui pelaksanaan penjangkauan, registrasi, asesmen, pembinaan, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan, hingga penentuan penanganan lanjutan. Sementara itu, pembelajaran terlihat dari adanya evaluasi terhadap perkembangan anak dan penyesuaian penanganan berdasarkan kondisi masing-masing anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam menangani anak terlantar dilaksanakan melalui proses yang bertahap dan saling berhubungan. Dinas Sosial tidak hanya berperan dalam memberikan pelayanan ketika anak ditemukan, tetapi juga berupaya memastikan anak mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya hingga adanya penyelesaian atau tindak lanjut. Strategi tersebut dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, pemahaman terhadap kondisi anak dan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan, pendampingan, serta penentuan apakah anak dapat kembali kepada keluarga atau membutuhkan penanganan melalui lembaga sosial. Meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat kondisi dan permasalahan yang beragam, upaya tersebut menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap anak terlantar. جامعة الرانري

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada Penanganan Anak Terlantar, dapat disimpulkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah melaksanakan berbagai strategi dalam menangani anak terlantar melalui tujuan yang jelas, pemahaman terhadap kondisi lingkungan, pengarahan dan koordinasi, tindakan nyata, serta evaluasi terhadap penanganan yang telah dilakukan. Strategi tersebut tidak hanya berfokus pada penanganan anak Ketika ditemukan terlantar, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pembinaan, pendidikan, pendampingan, pengasuhan, serta upaya mengembalikan anak kepada keluarga apabila kondisi keluarga masih memungkinkan.

1. Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu penjangkuan anak terlantar oleh WH yang bekerja sama dengan Dinas Sosial, kemudian dilakukan registrasi dan asmsen untuk mengetahui identitas, kondisi, serta permasalahan yang dihadapi anak. Setelah itu, mendapatkan pembinaan dan ditempatkan sementara di Rumah Singgah untuk memperoleh kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan tempat tinggal. Selanjutnya, berdasarkan hasil asmsen, Dinas Sosial menentukan penanganan lanjutan sesuai dengan kondisi anak. Anak yang masih memiliki keluarga dan dinilai dapat di asuh dapat dikembalikan melalui proses pembinaan keluarga, sedangkan anak yang membutuhkan pengasuhan dan pendidikan lebih lanjut dapat ditempatkan pada lembaga sosial atau panti. Bagi

anak berasal dari luar kota Banda Aceh, Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial daerah asal untuk menentukan penanganan selanjutnya. Penanganan tersebut menunjukkan bahwa strategi Dinas Sosial dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing anak.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkaitan dengan dukungan dari kerja sama dan koordinasi sebagai tempat penanganan lanjutan, serta adanya sumber daya dan fasilitas yang mendukung proses pelayanan. Sementara itu, pelaksanaan strategi masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan kondisi anak dan keluarga yang beragam, keterbatasan dalam proses penanganan, serta kebutuhan anak yang berbeda beda sehingga membutuhkan bentuk pelayanan yang tidak sama. Kondisi ini tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak terlantar membutuhkan koordinasi yang penyesuaian secara berkelanjutan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan anak.

Secara keseluruhan, strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam penanganan anak terlantar telah dilaksanakan melalui serangkaian upaya yang terarah dan bertahap, mulai dari penjangkuan sampai dengan penanganan lanjutan. Namun, masih ditemukannya anak terlantar menunjukkan bahwa permasalahan tersebut belum dapat di selesaikan hanya melalui penanganan setelah anak ditemukan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan upaya pencegahan, pembinaan keluarga, koordinasi antar instansi, serta evaluasi secara berkelanjutan agar penanganan anak terlantar dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

1. Bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh, diharapkan dapat meningkatkan upaya pencegahan anak terlantar dengan tidak hanya berfokus pada penanganan setelah anak ditemukan, tetapi juga memperkuat pembinaan dan pendampingan terhadap keluarga yang memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang rentan. Upaya tersebut penting untuk mengurangi kemungkinan anak Kembali mengalami kondisi terlantar.
2. Dinas Sosial Kota Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dengan Satpol PP/WH, Dinas Sosial daerah lain, lembaga sosial, panti, serta pihak terkait lainnya agar proses penanganan anak terlantar dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan, terutama bagi anak yang berasal dari luar Kota Banda Aceh.
3. Dalam pelaksanaan pelayanan Rumah Singgah, diharapkan pemenuhan kebutuhan dasar anak dapat terus ditingkatkan serta disertai dengan pembinaan dan pendampingan yang sesuai dengan kondisi masing masing anak. Hal ini penting agar penanganan tidak hanya memenuhi kebutuhan anak selama berada di Rumah Singgah, tetapi juga membantu menentukan tindak lanjut yang tepat.
4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai anak terlantar dengan mengkaji aspek lain yang belum di bahas secara mendalam dalam penelitian ini, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penanganan dan perlindungan anak terlantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Aceh, Darussalam-banda, 'Upaya Pencegahan Dan Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Dilakukan Oleh Dinas Sosial Yang Berkoordinasi Dengan Instansi Terkait, Aparat Kecamatan Dan Gampong Atau Nama Lain, Tokoh Masyarakat, Ulama, Dan Tokoh Agama Lainnya.', 2020
- Aceh, Dinas Sosial Kota Banda, 'Sejarah Dinas Sosial Kota Banda Aceh' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/>>
- Anak, Tentang Perlindungan, Dengan Rahmat, Tuhan Yang, Maha Esa, and Presiden Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan', 2014
- 'Bidang Rehabilitasi Sosial' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/bidang-rehabilitasi-sosial/>>
- Indonesia, Republik, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Dengan', 2009
- Indonesia, Universitas Ubudiyah, Murnia Suri, and Dinas Sosial, 'Perlindungan Kesejahteraan Anak Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak) Protection of Child Welfare in Banda Aceh City (Study On The Implementation of Qanun No . 11 of 2008 Concerning Protection of Children)', 8 (2022), 1–8
- 'Jr. Alfred D. Chandler, Strategy And Structure: Chapters In The History Of The Industrial Empire (Cambridge: Mit Press).', 2026
- Kronberger, Martin; Geoff Mulgan, 'Mulgan.', *Public Administration Review*, 88 (2010), 592–95
- 'Lhery Swara Oktaf Adhania, "Perilaku Sosial Anak Terlantar Dalam Pola Pengasuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Di Kabupaten Lumajang", Vol.3 No. 2 (2019), Hlm. 29-30.'
- 'Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014, Hlm 64', 2020
- Miyeki, Kimiko, and Stisip Imam Bonjol, 'Implementasi Penanganan Antar (Anak Terlantar) Di Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Sebagai Pusat Pemerintah

Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh Memiliki Sosial Yang Cukup Tinggi Sehingga Berbagai Persoalan Kesejahteraan Sosial Masih Dapat Ditemukan, Ter', 1 (2023), 137–42

Mousa, Kavar Mohammed, Khairi Ali Auso Ali, and Sabahat Gurler, 'Strategic Planning and Organizational Performance: An Empirical Study on the Manufacturing Sector', *Sustainability (Switzerland)*, 16 (2024), 1–17 <<https://doi.org/10.3390/su16156690>>

'Mulgan.', 2026

'Pejabat Struktural' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/pejabat-struktural/>>

'Peran Dinas Sosial Dalam Menangani Anak Terlantar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak Di Kota Pekanbaru', 2024

'Perlindungan Anak Terlantar Menurut Hukum Islam', 18

Sandi, Irwan, 'Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terlantar Pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Irwan', *E Jurnal Katalogis*, 4 (2019), 150–60

Sheth, Ananya, and Joseph V Sinfield, 'An Analytical Framework to Compare Innovation Strategies and Identify Simple Rules', *Technovation*, 115 (2022), 102534 <<https://doi.org/10.1016/j.technovation.2022.102534>>

Sirojutholibin, Muhamad, 'Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Terlantar Melalui Peran Dan Kontribusi Lembaga HAMfile://.+ID+3041+Jalil+Anwar+Amanulloh+12289-12300.Pdf', 2 (2024), 791–800

Sosial, Dinas, and Kota Banda, 'Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh', 2016

Sukadi, Imam, Gatot Sapto Heriyawanto, Mila Rahayu Ningsih, Universitas Islam, Negeri Maulana, and Malik Ibrahim, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Terlantar Dalam Perspektif Negara Kesejahteraan', 14 (2020), 25–36 <<https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2876>>

'Visi & Misi Dinas Sosial' <<https://dinsos.bandaacehkota.go.id/profil/visi-misi/>>

E. Wawancara

Anak Terlantar. Wawancara oleh penulis. Banda Aceh, 20 Juli 2026.

Kabid Rehabilitasi Sosial. Wawancara oleh penzulis. Banda Aceh, 6 Juli 2026.

Kemalahayati. Wawancara oleh penulis. Banda Aceh, 6 Juli 2026.

Petugas Rumah Singgah. Wawancara oleh penulis. Banda Aceh, 21 Juli 2026.

Penyuluh Sosial Ahli Muda. Wawancara oleh penulis. Banda Aceh, 6 Juli 2026.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 surat keputusan pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 3058/Un.08/FISIP/Kp.07.6/12/2025

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam surat Keputusan Dekan;
- b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu pemerintahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 satu UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 025.04.2.4239325/2025, Tanggal 02 Desember 2024.
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 05 November 2025

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Saudara :
1. **Dr. Said Amirulkamar, M.M., M.Si.** Sebagai pembimbing I
2. **Habibul Abrar, B.Ssc., M.PP.** Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama : **Nurul Rahmati**

NIM : 220802066

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Judul : Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Anak Terlantar

- KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 08 Desember 2025
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Pemohonan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-190/Un.08/FISIP.I.05/02/2026

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

Sekretariat DPR Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220802066

Nama : NURUL RAHMATI

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Lambaet

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI DINAS SOSIAL KOTA BANDA ACEH DALAM PENANGANAN ANAK TERLANTAR**

Banda Aceh, 09 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3 Surat Pemohonan Penelitian



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banta Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
 Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoha@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 070/670/Ba.Kesbangpol/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
 2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
 3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: B-190/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/02/2026 tanggal 9 Februari 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : **Nurul Rahmati / 220802066**
 Pekerjaan Peneliti : Mahasiswa
 Alamat Peneliti : Jln. Blang Bintang Lama Gp. Lambaet, Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Besar
 Lokasi Penelitian : Dinas Sosial Kota Banda Aceh
 Lama Penelitian : 29 Juni s/d 29 September 2026
 Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
 Judul Penelitian : Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Anak Terlantar
 Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Strategi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Penanganan Anak Terlantar
 Peserta : -
 Penanggung jawab : Eka Januar, M.Soc.Sc. (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan).

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
 Pada Tanggal : **29 Juni 2026**

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,

Kizal Abdillah, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19731218 199303 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas/NTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Gambar 2 Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Gambar 3 Petugas Rumah Singgah



Gambar 4 Anak Terlantar



